



DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP PARTISIPASI PENDIDIKAN

Sulaiman¹, Era Prestoroika², Mujib³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia

¹imansulaiman137@yahoo.co.id

²erapretoroika@gmail.com

³mujib@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul; Dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri. Tujuan penelitian ini adalah; 1). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang. 2). Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang faktor yang mendorong serta menghambat dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, indikator yang diteliti adalah masukan (input) program BOS, proses pendistribusian (process) BOS, hasil (outcome) program BOS, Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Siswa Mengulang (AU). Data primer dikumpulkan dengan kuesioner, jumlah sampel penelitian sebanyak 35 orang. Analisis data dilakukan dengan analisis Tabulasi yaitu; memberi skoring terhadap item-item yang perlu diberi skor, setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data, menghitung jumlah skor jawaban dan memprosentasekan setiap pertanyaan, menghitung rata-rata per-item, menghitung prosentase total dari semua jawaban kuesioner, narasi kesimpulan dengan kriteria kesimpulan, dan melakukan analisa serta interpretasi data sesuai perhitungan dari data kualitatif sehingga didapatkan gambaran hasil penelitian. Penelitian ini mendapatkan hasil; bahwa pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 15 Kota Malang adalah baik (sesuai dengan harapan) yang berdampak pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Siswa Mengulang (AU) hal ini ditunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa yang masuk dan adanya penurunan jumlah siswa yang mengulang yang disebabkan kurangnya biaya untuk sekolah.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Program BOS, Partisipasi Pendidikan

ABSTRACT

This research takes the title; The impact of the implementation of the BOS program on education participation in Malang 15 Public Middle Schools Based on Malang Mayor Regulation Number 46 of 2010 Concerning Determination of the Contribution of Education Implementation (SPP) and Contribution of Education Development Costs (SBPP) to Elementary, Middle, High School and State Vocational Schools. The purpose of this study is; 1). To describe and analyze the impact of the implementation of the BOS program on educational participation in SMP Negeri 15 Kota Malang. 2). To describe and analyze the factors that encourage and inhibit the impact of the implementation of the BOS program on educational participation in SMP Negeri 15 Malang. This research uses descriptive qualitative research, the indicators studied are the input of the BOS program, the process of distributing the BOS process, the results of the BOS program, the School Participation Rate (APS) and the Repeating Student Number (AU). Primary data collected by questionnaire, the number of research samples as many as 35 people. Data analysis was performed by Tabulation analysis namely; scoring items that need to be scored, after the data has been collected, data processing is done, calculating the total score of the answers and presenting each question, calculating the average per item, calculating the total percentage of all answers to the questionnaire, narrative conclusions with conclusion criteria, and analyze and interpret data according to calculations from qualitative data so that an overview of research results is obtained. This research gets results; that the implementation of the BOS program in SMP Negeri 15 Kota Malang is good (in line with expectations) which has an impact on the School Participation Rate (APS) and the Repeat Student Number (AU) it is shown that there is an increase in the number of students who enter and there is a decrease in the number of students who repeat due to lack of fees for schools.

Keywords: Policy Evaluation, BOS Program, Educational Participation

PENDAHULUAN

Searah dengan tujuan pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan langkah-langkah reformasi atau menyempurnakan sistem pendidikan yang meliputi: (1) Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dimana dalam proses tersebut harus ada pendidikan yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik sehingga terjadi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran keparadigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang menitikberatkan peran pendidik dalam menstranformasi pengetahuan bergeser keparadigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya, (2)

Perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subyek pembangunan secara utuh (Dunn, 2013; Sadhana, 2011).

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, Pemerintah telah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan merealokasi sebagian besar dananya ke empat program besar yang dirancang untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin, akibat peningkatan harga BBM. Keempat program tersebut adalah untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai. Salah satu program di bidang pendidikan yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Surjadi, 2016). Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana ke sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP yang bersedia memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan peserta 2004/2005, PKPS-BBM bidang pendidikan untuk tingkat SD dan SMP diberikan dalam bentuk beasiswa bagi siswa miskin, yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM). Jumlah siswa miskin yang mendapat BKM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan. Pada tahun ajaran 2004/2005, BKM diberikan kepada sekitar 20% siswa SD dan 24% siswa SMP, dengan nilai beasiswa Rp.60.000 per semester per siswa tingkat SD dan Rp.120.000 per semester per siswa tingkat SMP. Setiap sekolah yang mendapat kuota tertentu, melakukan seleksi siswa yang berhak menerima. Selanjutnya dana BKM diberikan langsung kepada siswa terpilih melalui kantor pos yang ditunjuk. Program BOS mengadopsi pendekatan yang berbeda dengan BKM karena dana tidak diberikan kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah. Jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu. Adapun ketentuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah (1) SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agama non islam setara SD sebesar Rp 254.000,- /persiswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 21.000,00. Sekolah yang dicakup dalam program ini adalah SD/MI/SDLB/salafiyah setingkat SD dan SMP/MTS/SMPLB/salafiyah setingkat SMP, baik negeri maupun swasta. Program ini mulai dilaksanakan pada Juli 2005 bersamaan dengan awal tahun ajaran 2005/2006. Secara konseptual Program BOS berbeda dengan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak

(PKPS-BBM) bidang pendidikan sebelumnya. Sampai dengan tahun anggaran. (2) SMP/MTs/SMPLB/SMTP/Salafiyah/sekolah agama non islam setara SMP sebesar Rp. 354.000,-/persiswa/tahun atau rata rata tiap bulan Rp. 30.000,00. (3) Waktu pelaksanaan BOS pada tahun 2007 diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2007 yaitu untuk smester 2 tahun pelajaran 2006/2007 dan smester 1 (satu) tahun pelajaran 2007/2008;

Program BOS dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat Pendidikan Dasar (Wajardikdas) Sembilan Tahun. Sementara itu, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu," dan pasal 11, ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Dalam konteks ini, pada prinsipnya Program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban dana BOS yang telah diterima.

Berkaitan dengan pelaksanaan program BOS, di Kota Malang yang sudah dimulai tahun 2006 yang diterima satu smester (Juli-Desember) sedangkan untuk tahun 2007 memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.28.457.976.000,00. Dana bantuan BOS diterima langsung oleh masing-masing lembaga pendidikan, Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Atas baik negeri/swasta melalui nomor rekening Kepala Sekolah.

Permasalahan Program BOS di Kota Malang, secara konsep program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu, akan tetapi *kenyataan praktek dilapangan pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan, hal ini dapat kita buktikan masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai seperti mereka tetap saja dalam memperoleh layanan pendidikan selalu dibebani biaya pendidikan, contoh sejak pendaftaran murid/siswa baru di tingkat SMP Negeri sudah dikenakan untuk pembeliar formulir pendaftaran Rp. 5.000 s/d Rp. 10.000,- (besarnya pungutan ini khususnya siswa dari keluarga miskin*

terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan *bervariasi*, biaya *sumbangan uang gedung* berkisar Rp. 1.500.000 s/d Rp. 3.500.000, membayar *Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)*, belum lagi berbagai jenis iuran yang dikenakan siswa oleh sekolah dengan berbagai keperluan kegiatan belajar mengajar, seperti iuran OSIS, tiap peringatan hari besar yang dilakukan oleh sekolah, dan tentunya masih banyak pungutan yang harus ditanggung siswa yang dilakukan oleh sekolah dengan berbagai alasan. Padahal keberadaan program BOS seharusnya dapat membantu bagi masyarakat tidak mampu yang seharusnya untuk mendapatkan bantuan (Majalah Diknas Jatim, 2009).

Kelemahan lain pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan dilapangan belum sepenuhnya siswa/siswi miskin/tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS sehingga perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekurangan anggaran sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Dalam prakteknya pihak Kepala Sekolah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kredibilitas masih diragukan (Wawasan, 15 Desember 2010).

Permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar/sederajat maupun Sekolah Menengah Atas/setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru/penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan maupun iuran Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP.3) atau dalam bentuk lain dengan berbagai dalih. Bahkan sampai saat ini masih ada laporan bahwa terdapat beberapa warga yang berasal dari keluarga miskin menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah favorit dengan standar nasional karena benar-benar mempunyai prestasi siswa yang bagus, namun tetap dipungut biaya tambahan. Adanya penggunaan BOS yang tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOS cenderung digunakan untuk melakukan perbaikan fasilitas

gedung dan sarana komputer sehingga kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar anak sebagai penerima dana BOS (Wawasan, 26 Oktober 2010).

Ketertarikan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan BOS adalah dana BOS tersebut tidak diberikan langsung kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola oleh sekolah dan program BOS belum pernah dievaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga sampai saat ini belum mengetahui seberapa jauh manfaat dan dampak serta pemerataan BOS bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat efektivitas capaian sasaran program BOS di SMP Negeri (SMPN) 15 Kota Malang sekiranya perlu dilakukan kajian melalui dampak pelaksanaan program, dari sinilah maka penelitian ini akan mengangkat judul: DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TERHADAP PARTISIPASI PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 15 KOTA MALANG.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu (Miles, 2012). Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan Program BOS, faktor pendukung dan faktor penghambat serta dampaknya terhadap angka partisipasi pendidikan yang telah memperoleh layanan BOS di Kota Malang.

Dalam penelitian ini ditentukan lokasi penelitian yaitu di SMP Negeri 15 Kota Malang. Alasan yang melatar belakangi pemilihan lokasi tersebut adalah Program BOS di SMP Negeri 15 belum pernah dievaluasi oleh pihak sekolah maupun pihak lain yang terkait, terletak di pinggiran Kota Malang berada di tengah-tengah permukiman masyarakat miskin/ kurang mampu dan belum pernah diteliti oleh siapapun sehingga peneliti memiliki dorongan kuat untuk memilih lokasi penelitian ini.

Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan pengambilan sampel dengan tehnik *purposive* sampel, yaitu informan dipilih secara *purposive*. Pemilihan informan berdasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan memiliki data dan bersedia memberikan data. Mengingat tujuan penelitian ini ingin mengetahui dampak pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Partisipasi Pendidikan di

SMP Negeri 15 Kota Malang (Studi Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri).

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah semua tenaga pendidik atau guru, para siswa dan komite sekolah, serta orang tua/wali yang tidak terlibat dalam komite SMP Negeri 15 Kota Malang.

Yang menjadi sampel di sini adalah beberapa siswa dan orang tua/wali siswa, ketua komite sekolah dan beberapa guru SMP Negeri 15 Kota Malang. Di dalam pengambilan sampling menggunakan cara atau teknik *purposive* sampling yaitu pengambilan subjek penelitian yang didasarkan pada tujuan tertentu. Subjek yang diambil sebagai sample benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (Suharsimi Arikunto, 2010: 117).

Teknik pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada. Selain melakukan pengamatan juga diadakan pengumpulan data dan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang keberhasilan implementasi kebijakan Program BOS, disamping juga dilakukan pengamatan, informasi maupun data yang mendalam tentang faktor-faktor pendukung, faktor penghambat, dampaknya bagi Pelaksanaan Program BOS di lembaga Pendidikan Dasar.

Kemudian penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari Lembaga/Organisasi yang telah melaksanakan Program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selaku pihak yang telah penerima dana bantuan BOS sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan, rekaman tape recorder dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendiskrepsian

fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci (Hubermen: 2012: 8).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data primer (dari kuesioner) yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan lebih memberikan informasi yang lebih jelas tentang program BOS dan partisipasi pendidikan pada SMP Negeri 15 Kota Malang.

Tanggapan informan tentang indikator yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tanggapan Informan Tentang Masukan (*input*) Program BOS
SMP Negeri 15 Kota Malang

| Pertanyaan | Kategori / Skor Jawaban | | | | | | Jumlah | | Skor total | Mean skor |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----|-----|---|---|--------|-----|------------------|-----------|
| | 3 | | 2 | | 1 | | | | | |
| | f | % | f | % | f | % | f | % | | |
| 1 | 32 | 91 | 3 | 9 | 0 | 0 | 35 | 100 | 102 | 2,91 |
| 2 | 30 | 86 | 5 | 14 | 0 | 0 | 35 | 100 | 100 | 2,86 |
| 3 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 105 | 3,00 |
| 4 | 2 | 6 | 33 | 94 | 0 | 0 | 35 | 100 | 72 | 2,06 |
| 5 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 0 | 35 | 100 | 70 | 2,00 |
| 6 | 1 | 3 | 32 | 91 | 2 | 6 | 35 | 100 | 67 | 1,91 |
| 7 | 31 | 88 | 3 | 9 | 1 | 3 | 35 | 100 | 100 | 2,86 |
| 8 | 3 | 9 | 32 | 91 | 0 | 0 | 35 | 100 | 73 | 2,09 |
| Total mean skor | | | | | | | | | 19,69 | |
| Mean skor untuk indikator Masukan (<i>input</i>) Program BOS | | | | | | | | | $19,69:8 = 2,46$ | |

Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan uraian jawaban para informan kami, maka dapat diketahui bahwa mean skor indikatornya adalah 2,46 yang artinya informan setuju kalau Masukan (*input*) Program BOS pada SMP Negeri 15 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan informan tentang indikator Proses Pendistribusian (*process*) BOS yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Tanggapan Informan
Tentang Proses pendistribusian (*process*) BOS
SMP Negeri 15 Kota Malang

| Pertanyaan | Kategori / Skor | | | | | | | | Total skor | Mean skor | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|-----------|----|----|-----|--------------|-----------|--------|--|
| | Jawaban 3 | | | | Jawaban 2 | | | | | | Jumlah | |
| | f | % | f | % | f | % | f | % | | | | |
| 1 | 4 | 11 | 30 | 86 | 1 | 3 | 35 | 100 | 73 | 2,09 | | |
| 2 | 3 | 9 | 31 | 88 | 1 | 3 | 35 | 100 | 72 | 2,06 | | |
| 3 | 5 | 14 | 25 | 72 | 5 | 14 | 35 | 100 | 70 | 2,00 | | |
| 4 | 4 | 11 | 30 | 86 | 1 | 3 | 35 | 100 | 73 | 2,09 | | |
| Total mean skor | | | | | | | | | 8,24 | | | |
| Mean skor untuk indikator Proses pendistribusian (<i>process</i>) BOS | | | | | | | | | 8,24:4= 2,06 | | | |

Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan uraian jawaban para informan kami, maka dapat diketahui bahwa mean skor indikatornya adalah 2,06 yang artinya informan setuju kalau Proses Pendistribusian (*process*) BOS pada SMP Negeri 15 sudah tepat sasaran, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan.

Tabel 3
Tanggapan Informan Tentang Hasil (*outcame*) program BOS
SMP Negeri 15 Kota Malang

| Pertanyaan | Kategori / Skor Jawaban | | | | | | Jumlah | Total skor | Mean skor | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|---|---|--------|------------|---------------|------|
| | 3 | | 2 | | 1 | | | | | |
| | f | % | f | % | f | % | | | | |
| 1 | 2 | 6 | 33 | 94 | 0 | 0 | 35 | 100 | 72 | 2,06 |
| 2 | 30 | 86 | 5 | 14 | 0 | 0 | 35 | 100 | 100 | 2,86 |
| 3 | 31 | 88 | 4 | 12 | 0 | 0 | 35 | 100 | 101 | 2,89 |
| 4 | 34 | 97 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 | 100 | 104 | 3,25 |
| 5 | 33 | 94 | 2 | 6 | 0 | 0 | 35 | 100 | 103 | 2,94 |
| 6 | 28 | 80 | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 | 100 | 98 | 2,80 |
| 7 | 20 | 57 | 15 | 43 | 0 | 0 | 35 | 100 | 90 | 2,57 |
| Total mean skor | | | | | | | | | 19,37 | |
| Mean skor untuk indikator Hasil (<i>outcame</i>) program BOS | | | | | | | | | 19,37:7= 2,77 | |

Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan uraian jawaban para informan kami, maka dapat diketahui bahwa mean skor indikatornya adalah 2,77 yang artinya informan sangat setuju kalau Hasil (*outcome*) program BOS pada SMP Negeri 15 ada peningkatan dibanding sebelumnya.

Tanggapan atas pertanyaan data primer (dari kuesioner) tentang Partisipasi Pendidikan terkait dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang telah dikumpulkan dalam penelitian pada SMP Negeri 15 Kota Malang, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Tanggapan Informan Tentang Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SMP Negeri 15 Kota Malang

| Pertanyaan | Kategori / Skor | | | | | | | | Total skor | Mean skor | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----|----|----|-----------|---|----|-----|--------------|-----------|--------|--|
| | Jawaban 3 | | | | Jawaban 2 | | | | | | Jumlah | |
| | f | % | f | % | f | % | f | % | | | | |
| 1 | 5 | 14 | 30 | 86 | 0 | 0 | 35 | 100 | 5 | 2,14 | | |
| 2 | 4 | 12 | 31 | 88 | 0 | 0 | 35 | 100 | 74 | 2,11 | | |
| Total mean skor | | | | | | | | | 4,25 | | | |
| Mean skor untuk indikator Angka Partisipasi Sekolah | | | | | | | | | 4,25:2= 2,13 | | | |

Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan uraian jawaban para informan kami, maka dapat diketahui bahwa mean skor indikatornya adalah 2,13 yang artinya informan setuju Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada SMP Negeri 15 meningkat setelah adanya program BOS.

Tanggapan informan tentang indikator Angka Siswa Mengulang (AU) yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Tanggapan Informan Tentang Angka Siswa Mengulang (AU)
SMP Negeri 15 Kota Malang

| Pertanyaan | Kategori / Skor | | | | | | Jumlah | Total skor | Mean skor | |
|------------------------------------------------------|-----------------|---|----|----|---|---|--------|------------|-----------|------|
| | 3 | | 2 | | 1 | | | | | |
| | f | % | f | % | f | % | | | | |
| 1 | 2 | 6 | 33 | 94 | 0 | 0 | 35 | 100 | 72 | 2,06 |
| 2 | 3 | 9 | 32 | 91 | 0 | 0 | 35 | 100 | 73 | 2,09 |
| Total mean skor | | | | | | | | | 4,15 | |
| Mean skor untuk indikator Angka Siswa Mengulang (AU) | | | | | | | | | 4,15:2= | |
| | | | | | | | | | 2,08 | |

Sumber: Data primer diolah, 2012

Berdasarkan uraian jawaban para informan kami, maka dapat diketahui bahwa mean skor indikatornya adalah 2,08 yang artinya informan setuju Angka Siswa Mengulang (AU) pada SMP Negeri 15 menurun setelah adanya program BOS.

Pembahasan

Dampak pelaksanaan program BOS terhadap Partisipasi Pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang

Berdasarkan hasil penelitian Program BOS di SMP Negeri 15 Kota Malang menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOS adalah baik (sesuai dengan yang diharapkan), hal ini ditunjukkan bahwa indikator masukan (*input*) program BOS sebagian besar informan menyatakan setuju, proses pendistribusian (*process*) BOS sebagian besar informan menyatakan setuju dan hasil (*outcame*) program BOS sebagian besar informan menyatakan sangat setuju.

Masukan (*input*) program BOS, proses pendistribusian (*process*) BOS dan hasil (*outcame*) program BOS merupakan indikator-indikator penting, dimana mulai dari *input*, *process* dan *outcame* menjadi perhatian serius bagi SMP Negeri 15. Dengan *input*, *process* dan *outcame* program BOS yang baik akan berdampak pada Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Siswa Mengulang di SMP tersebut. Dengan adanya tingkat profesionalisme atau kemampuan dalam mengelola program BOS dan didukung dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang baik maka tujuan program BOS akan tercapai. Dengan demikian angka partisipasi pendidikan akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian tanggapan para informan, menunjukkan bahwa informan setuju kalau ada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Hal ini sesuai dengan sasaran program BOS itu sendiri yaitu untuk semua sekolah setingkat SD dan SMP (termasuk SMPT), baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Dan sekolah yang berhak menerima BOS adalah Semua sekolah SD/SDLB/SMP negeri wajib menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS maka sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal wajib menerima dana BOS.

Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah.

Berdasarkan uraian tanggapan para informan juga menunjukkan bahwa informan setuju kalau ada penurunan Angka Siswa Mengulang (AU) di SMP Negeri 15 setelah adanya program BOS. Dari hasil dokumentasi di SMP Negeri 15 Kota Malang juga terlihat bahwa telah ada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan menurunnya jumlah siswa yang mengulang yang disebabkan kurangnya biaya untuk sekolah. Hal ini sejalan dengan tujuan BOS secara umum adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Demikian ini sejalan dengan tujuan BOS secara khusus adalah (Buku Panduan BOS, 2010):

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasi sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SMP Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada sekolah bertaraf internasional (SBI) dan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI).
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun banyak program yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan

perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta program dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Tahun anggaran 2011, dana BOS diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember yaitu semester 2 tahun pelajaran 2010/2011 dan semester 1 tahun pelajaran 2011/2012.

Penyaluran dilakukan setiap periode 3 bulanan yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Penyaluran dilakukan di bulan pertama setiap triwulan, kecuali periode Januari-Maret paling lambat bulan Februari.

Faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2010.

Di SMP Negeri 15 Kota Malang terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong dampak pelaksanaan program BOS yaitu jumlah SDM pelaksana dan pengelola/penyelenggara program BOS pada SMP Negeri 15 Kota Malang memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung, berpengalaman dan memiliki kemampuan dalam menangani program BOS sehingga dampak pelaksanaan program BOS berdampak positif sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terkadang pencairan anggaran BOS terlambat 2 (dua) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan baru ditransfer ke rekening kepala sekolah dan juga banyaknya tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan buku panduan BOS dalam pengambilan dana BOS sehingga menyulitkan pihak sekolah. Faktor penghambat tersebut harus diminimalisir dengan cara mengkonfirmasi sesegera mungkin ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Propinsi akan keterlambatan tersebut, sehingga pencairan dana BOS berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap partisipasi pendidikan.

Program BOS yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APS dan AU, namun juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain

daripada itu dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar (Buku Pedoman BOS, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dinyatakan dalam rumusan masalah pada Bab pertama yaitu Sejauh mana dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan dan apa saja faktor yang mendorong serta menghambat dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 46 Tahun 2010 Tentang Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) Pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan di SMP Negeri 15 Kota Malang adalah positif (sesuai dengan yang diharapkan), hal ini ditunjukkan bahwa indikator masukan (*input*) program BOS sebagian besar informan menyatakan setuju, proses pendistribusian (*process*) BOS sebagian besar informan menyatakan setuju dan hasil (*outcome*) program BOS sebagian besar informan menyatakan sangat setuju.

Dengan *input*, *process* dan *outcome* program BOS yang baik itulah pada akhirnya berdampak pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Siswa Mengulang (AU) di SMP tersebut. Disamping itu juga didukung oleh adanya tingkat profesionalisme atau kemampuan dalam mengelola program BOS dan adanya petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis yang baik maka tujuan program BOS tercapai dan pada akhirnya meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian bahwa terdapat hambatan dan pendukung dampak pelaksanaan program BOS terhadap partisipasi pendidikan berdasarkan peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2010:

1. Faktor Penghambat

Ketidaksihinggaan waktu pentransferan dana BOS ke pihak sekolah dengan jadwal yang telah ditentukan 2 sampai dengan 4 bulan. Banyaknya tahapan yang harus dilakukan oleh pihak SMP Negeri 15 Kota Malang sesuai dengan buku panduan BOS dalam pengambilan dana BOS sehingga menyulitkan pihak sekolah.

2. Faktor pendukung

SDM pelaksana dan penyelenggara/ pengelola program BOS di SMP Negeri 15 Kota Malang memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung, berpengalaman dan memiliki kemampuan dalam menangani program BOS. Adanya tingkat profesionalisme dalam mengelola program BOS di SMP Negeri 15 Kota Malang dan didukung dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, N. William. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Majalah Diknas Provinsi Jawa Timur. (2007). *Pelaksanaan BOS di Jawa Timur*.
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. (2012). *Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis—Sage Publications, Inc)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Menteri Pendidikan Nasional. (2010). *Panduan BOS*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Walikota Malang No. 46 Tahun 2010 Tentang Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) Pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri.
- Sadhana, Kridawati. (2011). *Realitas Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Surjadi, Ace. (2016). *Kebijakan Pemerintah di bidang Bantuan BOS Pendidikan Dasar* Makalah. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Wawasan, Tanggal 20 Juni 2010 Menanggapi Pelaksanaan BOS di Kota Malang.